

Migrasi, Kewarganegaraan, dan Partisipasi Imigran: Studi Kasus Imigran Turki di Belanda¹

Gusnelly²

Abstract

This article focuses on transnational migration in Europe, primarily on the Turkish migrants diaspora and their citizenship participation in the Netherlands. Their migration history and its patterns are unique, thus interesting to be explored. The presence of the Turkish migrants has enriched the ethnic diversity in the European Society, including the Dutch. They seek for acknowledgement in their *host* country through citizenship, to gain various accesses from the local government to the European society in general. The basic analyses of the paper based on empirical studies on the Turkish migrants. The questions posed in this article are (1) what is the importance of being "European" citizen and why are they applying the Dutch citizenship? (2) How is the relationship between the Turkish migrants and the Dutch government especially to gain various accesses from local government? To answer these questions, the article will explore the history and motivation of the Turkish, interaction between the Turkish migrants and the native society, and how they interact with other ethnic groups, local institution and government. These would lead to the discussion about the participation of the Turkish migrants on the public spheres.

Keywords: transnational migration, Turkish migrants, integration, Dutch citizenship

-
- 1 Informasi dan data dalam artikel ini berasal dari kegiatan penelitian selama 5 tahun yang dilakukan oleh tim peneliti divisi Eropa PSDR-LIPI, sekaligus menjadi refleksi singkat dari hasil studi tentang migrasi etnik dan pembentukan masyarakat diaspora di Eropa (Belanda dan Jerman).
 - 2 Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI. Dia bisa dihubungi di nellylipi@yahoo.com

Pendahuluan

Migrasi transnasional merupakan suatu konsekuensi langsung dari proses internasionalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Aktifitas ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Batas-batas lintas negara tampaknya juga akan semakin tipis karena terdorong oleh mobilitas manusia yang semakin sulit untuk dihentikan. Arus masuk manusia ke Eropa tidak hanya berasal dari negara-negara Eropa, tetapi juga dari luar Eropa. Pada tahun 1990 jumlah keseluruhan migran yang berdomosili di 12 negara Eropa adalah sekitar 13 juta orang. Sekitar 3 juta di antaranya datang dari beberapa negara berkembang dari luar kawasan Eropa. Bahkan migrasi transnasional pada masa yang akan datang, diperkirakan akan didominasi oleh para imigran yang berasal dari bukan negara-negara Eropa.

Negara-negara Eropa, sebagai penerima imigran sudah sejak lama dan terbiasa dengan dinamika masuknya orang-orang asing ke wilayah mereka. Bagaimanapun, migrasi telah berperan penting dalam proses transisi dan pertumbuhan penduduk di Eropa sejak dahulu.³ Jumlah penduduk Eropa yang mencapai lebih dari 680 juta merupakan hasil dari aktifitas migrasi dari masa ke masa.⁴ Diperkirakan pada tahun 1970-1971, terdapat sekitar 15 juta jumlah orang asing di Eropa dan kemudian meningkat menjadi 19 juta orang pada tahun 1992-1993. Pada tahun 2000 sudah ada sebanyak 21.16 juta orang asing di Eropa. Jumlah populasi orang asing tersebut berkisar 2.6 persen dari total penduduk Eropa pada tahun 2000. Bahkan jumlah imigran ini akan terus bertambah sekitar 13 juta setiap tahunnya mulai tahun 2000-2050 (Salt, John, 2001; 5-6).

Migrasi ke negara-negara Eropa, seperti Belanda terjadi karena kebutuhan akan tenaga kerja asing untuk membantu program restrukturisasi dan sebagai alat ekspansi perekonomian pasca PD II. Berkembangnya industri di beberapa negara Eropa termasuk Belanda, pemerintah Eropa melalui asosiasi *Common Nordic Labour Market* dan *Masyarakat Ekonomi Eropa* (MEE) memfasilitasi arus masuk tenaga kerja migran (*guest workers*) ke beberapa negara di Eropa Barat (Ohliger, and Schönwalder, 2002; p.4-5). Tidak hanya itu saja, mobilitas manusia dalam hal ini pengungsi menjadi bagian penting dalam perkembangan arus migrasi di Eropa, termasuk Belanda di kemudian hari.

3 Walaupun menerima aliran migrasi yang besar, sebagian besar negara di kawasan ini tidak menyatakan dirinya sebagai negara imigrasi untuk menghindari adanya aliran migrasi yang berlanjut. Di abad ke-20-an di beberapa negara, seperti Belanda, dan Perancis mengalami perubahan status, jika sebelumnya negara ini menjadi negara pengirim migran dalam seketika setelah berakhirnya Perang Dunia ke II berubah menjadi negara penerima imigran. (Amersfoort dalam Bocker et al, 1998: 119)

4 Ostergren. Robert.C. 2004, *The European: A Geography of People, Culture, and Environment* (New York- The Guilford Press), hal 67.

Ada dua hal penting yang mengubah tren dan pola migrasi di negara-negara Eropa Barat seperti Belanda. *Pertama*, terjadinya proses restrukturisasi perekonomian negara setelah PD II yang menjembatani masuknya tenaga kerja migran ke Belanda (Eropa). *Kedua*, terjadinya perubahan konfigurasi dan struktur perekonomian di kawasan Eropa yang disebabkan terbentuknya Uni Eropa (UE).

Migrasi yang terjadi pada masa restrukturisasi ekonomi setelah PD II ditandai oleh masuknya tenaga kerja migran ke beberapa negara Eropa Barat (Jerman, dan Belanda). Migrasi tenaga kerja asing (*guest workers*) dilakukan melalui mekanisme perjanjian bilateral dengan beberapa negara pengirim. Arus tenaga kerja pada awalnya berasal dari beberapa negara di kawasan Eropa Selatan, seperti Spanyol, Italia dan Yunani. Berikutnya, pada tahun 1960-an, perekrutan tenaga kerja di arahkan ke negara-negara di kawasan Mediteranian, seperti Turki⁵, Tunisia dan Maroko. Ketika terjadi resesi ekonomi tahun 1966, pemerintah memulangkan sebagian tenaga kerja ke negara asalnya. Setelah perekonomian Belanda mulai membaik pada tahun 1968, arus masuk tenaga kerja mulai kembali sampai terjadinya krisis minyak tahun 1973 (Vermeulen, 2000: 54).

Tren migrasi berikutnya terjadi dalam bentuk perpindahan keluarga (*family reunification dan family formation*) yang sekaligus menjadi awal terbentuknya proses *resettling* imigran bersama keluarganya di Belanda. Tren migrasi kelompok pencari suaka politik dan pengungsi merupakan arus migrasi selanjutnya yang ikut menambah jumlah orang asing atau pendatang ke Belanda. Gelombang migrasi lanjutan ini yang selanjutnya memberikan beban pada sistem integrasi sosial pada negara di kawasan ini, di mana salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat integrasi dalam pasar tenaga kerja (White, B. Jenny, 1997; 755-756). Bagaimanapun, imigran membutuhkan tempat untuk membangun sebuah komunitas yang baru. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk melakukan penyesuaian dan mengintegrasikan diri dengan kultur setempat. Menurut Penninx, integrasi adalah sebuah proses untuk menjadi anggota yang diakui, diterima dan menjadi satu bagian dalam sebuah masyarakat (Penninx, 2004). Dengan kata lain integrasi menekankan bahwa pendatang (*new comers*) harus mampu beradaptasi dengan budaya setempat dan membuat keberadaan mereka diterima oleh masyarakat setempat. Apabila didefinisikan secara lengkap maka integrasi adalah *sebuah*

5 Para imigran Turki pada awalnya hanya bermaksud mencari pekerjaan tanpa menetap lama (sebagai *guest workers*) di negara tempat mereka bermigrasi. Kebanyakan dari para pria yang pergi migrasi, semula hanya ingin mencari uang kemudian membawanya pulang untuk diserahkan kepada keluarganya. Namun kenyataan yang mereka temui adalah mahalnnya biaya hidup di negara yang mereka datang sehingga mereka harus menggunakan strategi agar dapat bertahan hidup. Para tenaga kerja migran ini biasanya tinggal di tempat-tempat yang kurang memadai. Uang yang dihasilkan sebisa mungkin disimpan.

proses adaptasi yang dilakukan oleh pendatang yang meliputi dua hal yaitu individu dan kelompok masyarakat di mana para pendatang harus membuat dirinya berada pada posisi yang dapat diterima oleh komunitas dimana dia berada. Dalam hal ini pendatang harus berasimilasi dan menerima ketentuan yang berlaku dalam komunitas yang dimasukinya. Proses integrasi harus berjalan perlahan-lahan dan setiap individu harus memahami di mana dan seperti apa budaya di tempat mereka berada.

Negara dan Imigran

Aktivitas migrasi transnasional memperlihatkan betapa negara sangat berperan sekali terutama dalam proses pengiriman dan penerimaan. Negara tidak hanya sebagai fasilitator yang mempermudah akses untuk individu atau kelompok untuk bermigrasi. Akan tetapi, negara juga mempunyai kepentingan secara politik. Perjanjian bilateral antara negara penerima dan pengirim merupakan salah satu strategi yang dibuat untuk memenuhi harapan dan kepentingan negara. Imigran berangkat ke tempat yang baru dengan membawa harapan bahwa pemerintah dan masyarakat di negara tujuan dapat menerima keberadaan mereka yang membawa serta prinsip-prinsip dasar atau budaya leluhurnya. Imigran berharap identitas budaya mereka sebagai sebuah kelompok etnik dilindungi di negara yang baru. Imigran juga menginginkan untuk memiliki identitas formal yaitu pengakuan dalam hukum sebagai warganegara untuk mempermudah akses dalam aktivitas keseharian sebagai sebagai kelompok pendatang.

Hampir semua negara-negara di Eropa Barat menjadi negara penerima imigran. Beberapa negara, seperti Perancis, Inggris dan Belanda menjadi negara penerima imigran sejak tahun 1960-an. Penempatan imigran secara berkelompok dalam satu lokasi dengan karakteristik yang sama merupakan kebijakan yang telah disepakati oleh negara penerima dan pengirim. Misalnya, imigran dari wilayah Mediterania seperti orang Turki dan Maroko tinggal bersama atau berdekatan dalam satu lokasi. Imigran dari India tinggal satu lokasi atau berdekatan dengan imigran dari Pakistan (Kastoryano, 2003; 5). Lokasi tempat tinggal pekerja tamu ini berada di kawasan pedesaan (*suburb*) dan tidak jauh dari lokasi pekerjaan kerja mereka.

Para migran termasuk imigran Turki dipekerjakan dengan sistem kerja kontrak di sektor-sektor industri. Mereka tinggal di asrama-asrama khusus (barak) yang sudah disediakan oleh pemerintah dan tidak diperkenankan untuk membawa serta istri atau keluarganya. Namun sistem ini dianggap tidak efektif karena jumlah migran atau pengunjung ilegal (tanpa izin) menjadi besar. Masuknya para pekerja ilegal ke negara Eropa Barat melalui daerah perbatasan menjadi sebuah isu yang cukup kuat pada awal tahun

1970-an terutama ketika resesi ekonomi dunia tahun 1973.⁶ Kondisi yang sama sebenarnya juga dialami oleh Amerika Serikat yang juga banyak didatangi oleh migran dari negara-negara tetangganya dengan tujuan utama mencari kerja. Sehingga pemerintah Amerika Serikat waktu itu pun mencoba memperketat arus masuk migran ke negaranya (Roodenburg, dkk, 2004:381).

Pada masa lalu pengelompokan tempat tinggal imigran ini ditujukan untuk mempermudah kontrol negara atas segala aktifitas imigran. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya konflik antara pendatang dengan penduduk lokal, karena adanya perbedaan prinsip di antara mereka. Pemerintah di beberapa negara penerima imigran menyadari bahwa kedatangan dan masuknya orang asing memunculkan reaksi pro dan kontra dari penduduk lokal. Mereka hanya diakui sebagai pekerja tamu saja. Akses untuk menjadi warga negara juga diperketat oleh negara, namun secara bertahap dari masa ke masa masyarakat di beberapa negara penerima mulai mencoba untuk menerima keberadaan orang asing. Pemerintah negara yang bersangkutan membuka peluang untuk itu, misalnya di Jerman. Masyarakat di sana menerima dan mengakui keberadaan orang asing sebagai bagian dari masyarakat Jerman semenjak tahun 1990-an. Sikap ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pendatang (terutama generasi pertama) yang sudah menetap lama di Jerman untuk mendapatkan akses naturalisasi. (Rhoades, 1978).⁷

Masyarakat Belanda, lebih cepat menerima keberadaan imigran. Pada tahun 1980-an, pemerintah Belanda mempermudah akses untuk imigran mengajukan permohonan naturalisasi (Ching Lin Pang, 2002; Muskens, George, 2005; 5).⁸ Sisi lain, pada periode tahun 1980-an kebijakan imigrasi diberlakukan lebih ketat terhadap orang asing. Melalui kontrol negara, orang asing yang bekerja dan berasal dari luar kawasan Eropa, menurut European Economic Area (EEA), hanya diperkenankan untuk bekerja dengan kontrak kerja yang singkat. Melalui pembatasan masa kerja (*shortage*) pemerintah

6 Krisis minyak tahun 1973 menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi beberapa negara. Pada akhirnya tenaga kerja atau kaum imigran dari beberapa negara yang terkena dampak krisis adalah mencari kerja ke negara-negara yang lebih makmur, terutama negara di kawasan Eropa.

7 Jerman sudah cukup lama dan terbiasa dengan foreign workers, namun istilah terhadap pendatang ini seringkali berbeda-beda. Pada masa para pekerja dari Polandia masuk maka mereka lebih dikenal dengan sebutan *Aussiedler*, ketika foreign workers dari Mediteranian seperti orang Turki, dikenal dengan sebutan pekerja tamu (guest workers). Hal ini tidak lain karena pemerintah Jerman tidak menginginkan orang asing menjadi warga negaranya karena bukan berasal dari keturunan bangsa Jerman. Lain halnya jika orang baru (new comers) yang masuk ke Jerman memiliki darah Jerman (Germany descent).

8 Permohonan naturalisasi oleh imigran merupakan implementasi dari kebijakan *Allochtonenbeleid'* (*allochthoneous policy or minorities policy*) tahun 1987 yang menetapkan siapa yang disebut imigran di Belanda dan harus berintegrasi dan akan difasilitasi oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari draft minorities memorandum (*Ontwerp-minderhedennota*). yang dibuat oleh parlemen di tahun 1981 lihat dalam Siedenburg, Anton W. 2004, 5-6

Belanda mencoba untuk secara bertahap mengurangi jumlah orang asing. Setidaknya upaya tersebut berguna membantu proses recovery perekonomian pasca krisis minyak 1973 dan 1983 (Roodenburg, Euwals dan Terrele; 2004; 378). Berikutnya pemerintah Belanda mulai membuat kebijakan-kebijakan integrasi. Secara bertahap pula pemerintah mendorong imigran untuk berintegrasi dengan budaya dan masyarakat setempat. Kebijakan ini merupakan piranti yang penting untuk membantu berjalannya program yang telah disusun oleh negara.

Pada tahun 1981, pemerintah menyusun *draft minorities memorandum (Ontwerp-minderhedennota)* dan menetapkan *draft* tersebut menjadi undang-undang (*minorities act*) pada tahun 1983. Sejak keluarnya peraturan tersebut, kelompok minoritas dianjurkan belajar bahasa dan budaya Belanda sesuai dengan motto yang dikeluarkan "*integration while preserving one's own identity*".⁹ Secara bertahap pula kebijakan integrasi diperbaharui oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1987 pemerintah mengeluarkan kebijakan integrasi yang baru yaitu *Minorities Policy (allochthoneous policy)*, dan menetapkan bahwa imigran harus berintegrasi dan akan difasilitasi oleh pemerintah¹⁰. Kemudian pada tahun 1994, pemerintah memperkenalkan kebijakan integrasi yang baru yaitu *New Integration Policy*. Pemerintah menganjurkan kepada semua pendatang untuk kursus bahasa dan budaya Belanda dan melaporkan setiap perkembangan dari kemajuan yang sudah dicapai selama proses belajar berjalan. Program integrasi ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dari bab 5 perjanjian Maastricht tahun 1991 (*the Maastricht Treaty 1991*) yang menetapkan bahwa pemerintah di negara-negara nasional harus mulai memberikan perhatian kepada para imigran. Upaya pembatasan izin masuk terus dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan *the Linkage Act (1998)*. Kebijakan yang lebih ketat terhadap pendatang ini sekaligus ditujukan untuk melakukan kontrol terhadap arus masuk imigran. Kebijakan integrasi pemerintah seharusnya mengikuti strategi dan taktik yang dipakai dalam proses integrasi pada level yang berbeda. Strategi yang dimaksudkan adalah kombinasi antara strategi kebijakan dari aktivitas mobilisasi tingkat "*top down*" dan "*bottom up*".

Pembaharuan kebijakan oleh pemerintah Belanda, tidak hanya karena adanya dorongan dari dalam negaranya semata, akan tetapi juga terjadi karena perubahan struktur dan konfigurasi secara politik dan ekonomi di kawasan Eropa. Konfigurasi politik itu terwujud dengan terbentuknya Uni Eropa. Kebijakan UE yang baru menuntut setiap negara anggotanya

9 Siedenburg, Anton W. 2004, "The Facts, Figures and Adjustments of the Dutch Newcomer Integration Act" see in Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany, p 2-3.

10 Ching Lin Pang, lihat pada <http://www.ces.boun.edu> akses tanggal 5 Mei 2006.

untuk membuat kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan UE. Masing-masing negara anggota diperkenankan untuk membuat kebijakan sendiri selama masih berada dalam kerangka integrasi UE. Sejak Amsterdam Treaty 1997, kebijakan itu disepakati secara bersama oleh negara-negara anggota. Pada saat itu pula disetujui bahwa kebijakan migrasi dari negara-negara anggota merujuk pada kebijakan migrasi pemerintah UE, termasuk kebijakan perekrutan tenaga kerja asing.

Pemerintah UE menetapkan bahwa perekrutan tenaga kerja asing untuk tenaga kerja tidak terampil lebih diprioritaskan untuk mereka yang berasal dari negara-negara dalam satu kawasan. Jika melihat tren migrasi UE berdasarkan negara asal, maka dari beberapa informasi diketahui bahwa negara pemasok tenaga kerja berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet atau CEECs (*Central and Eastern European Countries*), seperti Andorra, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia dan Polandia. Kebijakan imigrasi UE untuk negara-negara bekas Uni Soviet agak berbeda dengan perjanjian imigrasi pada masa lampau. Kebijakan untuk pekerjaan kasar dan professional berbeda. Yang lebih diharapkan dari pekerja asing yang masuk adalah yang professional, karena untuk memenuhi tuntutan *World Trade Organizations General Agreement on Trade in Services* (GATS) (Jansen, Milan, dkk, 2003; p.102).

Negara Belanda, sebagai salah satu negara anggota UE, menjadikan kebijakan imigrasi Uni Eropa sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan di negaranya. Misalnya dalam masalah kebijakan imigrasi untuk pendatang yang berasal dari bekas negara satelit Uni Sovyet. Negara-negara anggota UE menyepakati bahwa masyarakat dari negara-negara tersebut dapat memasuki kawasan Eropa. Bahkan pemerintah UE memberikan prioritas kepada mereka untuk memasuki pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan (*unskilled labour*). Belanda menerima sekitar 130,600 imigran dari negara CEECs pada tahun 1999. UE secara tidak langsung menawarkan konsep identitas yang plural kepada warganegara, yaitu identitas sebagai orang Eropa dan identitas sebagai orang Belanda. Dengan identitas yang plural maka peran yang dilakoni pun beragam. Identitas sebagai imigran, kemudian "*foreigner*" dan "*black*", pada akhirnya menjadi strategi bagi politik identitas dan partisipasi bagi pendatang. Para pendatang membangun strategi politik identitas mereka berdasarkan kultur, etnik, nasionalitas atau agamanya. Bagaimanapun tetap ada sebuah identitas yang dipilih untuk diakui secara formal oleh negara, merupakan sebuah hasil dari interaksi dengan negara, kemudian publik menerima pengakuan tersebut (Kastoryano, 2003).

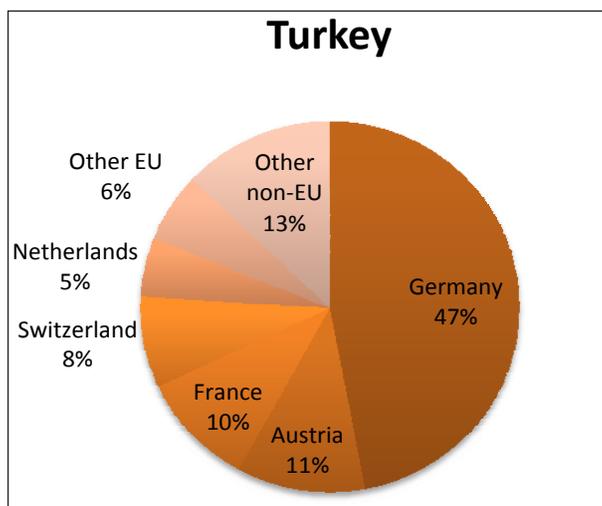
Interaksi yang dibangun dengan negara bukan tanpa alasan, adanya kepentingan yang besar terkandung di dalamnya. Selain pengakuan akan keberadaan sebagai imigran, juga menjadi alat untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik pada level pemerintah maupun level nonpemerintah. Strategi yang dibangun melalui interaksi dengan

negara menunjukkan solidaritas mereka terhadap jaringan lintas negara (transnasional) berdasarkan identitas atau kepentingan tertentu. Jika interaksi dengan negara gagal dilakukan, maka individu tersebut akan dihadapkan pada pilihan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas dari mana dia berasal.

Diaspora Orang Turki di Belanda

Belanda, sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 42.000 km dan biasa disebut sebagai "*small country, think big*". Pada masa lalu, Belanda hanya negara kecil yang belum terlalu diminati oleh kaum immigran, termasuk orang Turki. Negara-negara yang memiliki industri besar saat itu adalah Perancis, Inggris dan Jerman, sehingga tujuan migrasi mereka cenderung ke sana. Sebelum Perang Dunia II, negara-negara seperti Perancis, Inggris dan Jerman merupakan negara tujuan yang lebih menjanjikan bagi para imigran di sektor ekonomi, karena perkembangan dunia industri yang begitu cepat di Eropa kala itu dikendalikan oleh ketiga negara ini. Secara garis besar dalam grafik di bawah ini (Schoorl, 2001) mencoba menjelaskan tingkat ketertarikan orang Turki bermigrasi.

Grafik. 1
Negara Tujuan yang paling diminati oleh Migran Turki



Sumber: Schoorl, 2001

Belanda memiliki jumlah penduduk hampir 16,3 juta orang dalam setiap satu kilo meter terdapat sekitar 460 orang, dan inilah yang membuat padatnya negara kincir angin ini. Kepadatan penduduk di kota-kota ini sekaligus memperlihatkan kebhinekaan negara Belanda (Andeweg, R.B and

Galen A. Irwin, 2005; 1-2). Sebagai negara plural, pemerintah mengakui representasi kultural dan keagamaan serta mengakui keberadaannya di ruang publik. Keberagaman etnik pendatang yang hidup berkembang, menciptakan masyarakat diaspora. Demikian pula halnya dengan etnik Turki. Pembentukan komunitas diaspora terjadi karena adanya migrasi yang menjadi awal dari proses perpindahan budaya atau disebut "*travelling cultures*" (Crammer, 2002;23).

Sejarah diaspora orang Turki dimulai ketika pemerintah Belanda memerlukan tenaga kerja untuk menjadi alat ekspansi ekonomi pada tahun 1960-an. Pemerintah belum berpikir tentang asal usul tenaga kerja yang masuk apalagi memikirkan bahwa kelak pekerja tamu tersebut akan menjadi imigran di negaranya. Kebijakan pemerintah lebih fokus hanya untuk mendapatkan tenaga kerja murah, berbadan sehat, bersedia dipekerjakan sebagai tenaga kerja kasar, dan mereka hanya bekerja untuk sementara (*shortage workers*) atau disebut pekerja tamu. Melalui perjanjian bilateral *Labour Export Agreement* pada tanggal 19 Agustus tahun 1964 dan lebih dikenal dengan *Treaty of Recruitment*, arus migrasi pekerja tamu dari Turki pun dimulai.¹¹

Pada tahun 1966, sejumlah orang Turki datang ke Belanda secara ilegal (*unofficial channels*). Ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1966, pemerintah memulangkan sebagian tenaga kerja ke Turki. Setelah perekonomian Belanda mulai membaik pada tahun 1968, arus masuk tenaga kerja dimulai kembali sampai terjadinya krisis minyak pada tahun 1973 (Vermeulen, 2000, p.154). Pada tahun 1970-an terdapat 36.000 imigran Turki, kemudian menjadi 142.106 pada tahun 1980-an dan menjadi dua kali lipat jumlahnya pada tahun 1990-an. Pada tahun 2007 sudah terdapat sekitar 740.000 orang Turki di Belanda dan merupakan kelompok imigran terbesar saat ini. Jika di Belanda saja jumlah imigran Turki sudah menjadi kelompok etnik terbesar, maka sudah pasti jumlah mereka juga mendominasi di beberapa negara Eropa lainnya¹².

Jumlah kelompok imigran yang semakin membesar dan makin besar pula peranan mereka dalam perekonomian, pada akhirnya memunculkan tanggapan negatif dari sebagian kalangan di Belanda. Padahal tujuan dikeluarkannya kebijakan minoritas adalah untuk memercecil jarak di

11 Orang Turki merupakan salah satu etnis penyumbang terbesar para imigran di kawasan Eropa. Data dari *SOPEMI (Continues Reporting System on Migration)* menyebutkan bahwa jumlah orang Turki di Eropa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980, jumlah orang Turki hanya 1.845 ribu orang kemudian meningkat menjadi 2.333 ribu orang pada tahun 1990 dan tercatat 2.606 ribu orang pada tahun 2001. Data lain dari *World Economic and Social Survey* tahun 2004, menyebutkan bahwa pada tahun 2000 proporsi Turki adalah 73.4% dari semua imigran di Jerman. Sedangkan pada tahun yang sama proporsi Turki di Perancis hanya sebesar 8.1% (*World Economic and Social Survey*, 2004:46).

12 Siedenburg. Anton.W. 2004, "The Fact, Figures and Adjustment of the Dutch Newcomer Integration Act", paper dalam workshop tentang Integrasi Orang Turki di Austria, Belanda dan Jerman, dilaksanakan oleh Universitas Bogazici, Jerman.

antara keduanya. Pada satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas untuk berpartisipasi (berintegrasi) ke dalam semua sisi kehidupan. Sisi lain, hal ini juga membuka peluang kepada kelompok imigran yang tidak mampu berintegrasi untuk kembali ke negara asal (Siedenburg, Anton W. 2004;5-6). Persoalan integrasi kelompok minoritas bukan hanya sekedar persoalan kebijakan legal formal, akan tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan yang mendasari relasi mayoritas-minoritas dalam masyarakat Belanda (Muzakir, 2007, 45).

Persoalan ekonomi dan latar belakang budaya kaum imigran tampaknya menjadi masalah yang rumit di Belanda. Jika tanah Belanda merupakan ruang sosial, maka ia terdiri atas berbagai macam pelaku-pelaku sosial yang beraneka ragam dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya. Masing-masing pelaku memiliki relasinya sendiri-sendiri. Para pelaku sosial itu memiliki keunikan dan nilai budaya sendiri yang masih memiliki keterikatan yang kuat dengan negara asalnya. Etnik imigran juga memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi habitus mereka. Pengakuan akan habitus mereka yang unik dan khas adalah hasil dari interaksi atau dialektika dengan yang lain, dan bagaimana orang-orang tersebut melihat dirinya dan bagaimana yang lain melihat mereka (Barth, 1988). Identitas mereka yang unik, menandai dan sekaligus menjadi simbol etnik mereka.

Ketika pertama kali datang ke Belanda, orang Turki masih dikategorikan sebagai masyarakat yang homogen yaitu generasi pertama yang didominasi oleh kaum laki-laki. Setelah gelombang generasi pertama masuk, disusul oleh generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya mereka sudah bersifat heterogen. Kelompok generasi berikutnya ini sudah lebih baik daripada generasi sebelumnya terutama dalam adaptasi dengan kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik. Generasi ketiga muncul sebagai pembawa perubahan dalam dunia pendidikan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Eropa. Artinya bahwa imigran Turki di Eropa khususnya di Belanda sudah menjadi komunitas diasporik yang telah terfragmentasi sedemikian rupa, sehingga batas-batas identitas tradisional yang menjadi karakteristik yang khas dari kelompok mereka mengalami peleburan dan dikonstruksi kembali ke dalam format yang baru. Fragmentasi ini tidak hanya berlangsung dalam konteks relasi antara kaum imigran dengan masyarakat *host country*, tetapi juga di dalam internal kaum imigran sendiri.

Generasi pertama lebih cenderung memilih identitas sebagai orang Turki, sementara generasi berikutnya terutama generasi ketiga lebih memilih untuk menjadi warga negara Belanda. Alasannya karena mereka lahir, tinggal dan mendapatkan pendidikan di Belanda maka identitas sebagai orang Turki sudah tidak diperlukan lagi. Anak-anak dari kelompok imigran Turki generasi-generasi selanjutnya sudah tidak menganggap lagi kultur Turki sebagai satu-satunya sumber acuan bagi pembentukan identitas dirinya. Generasi sebelumnya selalu memiliki keinginan yang kuat untuk

pulang, dan mereka menabung untuk bisa pulang ke Turki. Namun bagi anak-anak keturunannya, pulang ke negara asal sudah tidak menarik lagi. Mereka tumbuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda (Eropa) pada umumnya, menonton program televisi yang sama dengan mereka, dan memakai pakaian atau mengonsumsi makanan yang juga dipakai dan dikonsumsi oleh orang Eropa pada umumnya (White, 1997).

Generasi pertama yang datang ke Belanda tahun 1960-an dan 1970-an murni karena adanya dorongan ekonomi dan tidak memerlukan integrasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kelompok generasi kedua yang datang di tahun 1980-an, terdorong oleh kondisi dan situasi politik yang tidak kondusif di Turki. Sisi lain, kelompok generasi ketiga yang lebih terbuka, meminta untuk diperlakukan sama dengan masyarakat pribumi, memiliki toleransi sosial, bersedia terlibat dalam partai politik dan sering melakukan dialog lintas budaya (Sen;2004;3-4). Kelompok ketiga inilah yang kemudian menjadi perwakilan yang utuh dari diaspora etnik Turki di Belanda baik dalam bidang politik dan ekonomi.

Partisipasi Kewarganegaraan Orang Turki di Belanda

Adanya fenomena masuknya orang-orang Turki sebagai pekerja tamu, kemudian berganti bentuk menjadi reunifikasi keluarga, membuat Belanda disebut sebagai negaranya para imigran. Belanda memberikan banyak harapan karena pemerintahnya menerima orang asing secara terbuka. Secara bertahap pemerintah mulai membuka peluang kepada imigran untuk memulai aktifitas meraih harapan yang telah mereka impikan. Jika pertama datang mereka hanya dijadikan sebagai alat ekonomi semata, namun pada periode pertengahan tahun 1980-an mereka mulai dipandang sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan warga lokal.

Kedatangan imigran, bagaimanapun tetap memunculkan persoalan bagi pemerintah Belanda. Meskipun jumlah mereka terbatas (minoritas), namun pemerintah mengakui bahwa belakangan kelompok *allochtonous* ini mulai ditekan oleh kelompok tertentu. Istilah *allochtonous* pun belakangan dikonotasikan secara negatif yaitu disebut sebagai kelompok "*black people*". Istilah "*black*" kemudian dilekatkan pula pada "*black school*", "*black street*" dan "*black market*". Penyebutan *allochtonous* untuk kelompok pendatang, baik imigran Turki maupun etnik lainnya sebenarnya ditujukan untuk membantu mempermudah akses imigran berintegrasi dengan masyarakat setempat (*autochtonous*). Kepada semua etnik pendatang yang disebut *allochtonous* pemerintah memberikan kemudahan untuk akses naturalisasi menjadi warganegara Belanda.

Dengan keberagaman imigran maka dibutuhkan solusi guna menghindarkan diri dari ancaman perpecahan yang dapat timbul karena gesekan di antara mereka maupun dengan warga lokal di negara tujuan. Guna mengurangi konflik di negara penerima imigran, hal yang

harus dilakukan adalah memfasilitasi imigran untuk berintegrasi dengan masyarakat di mana mereka tinggal (Carmon,1996:23). Integrasi juga dapat mendorong imigran untuk mengajukan permohonan naturalisasi atau mengajukan diri menjadi warga negara di tempat yang baru. Bagaimanapun status kewarganegaraan berada di dalam sebuah posisi yang penting dalam masyarakat.

Konsep dari *citizenship* (kewarganegaraan) memang agak sulit untuk didefinisikan. Pendefinisian yang umum atas konsep *citizenship* cenderung melihat pada hubungan antara kewenangan atau hak warganegara. Sementara itu kewarganegaraan itu sendiri adalah gabungan antara pengetahuan, kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Persoalan integrasi dan wacana *citizenship* adalah salah satu hal yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Menurut Musembi (2002) yang disitir ulang oleh Gaventa (2002)¹³, konsep *citizenship* menurut pemikiran Barat secara tradisional terkait dengan persamaan hukum bagi perorangan yang dilengkapi oleh seperangkat hak dan kewajiban yang dilimpahkan oleh negara kepada individu.

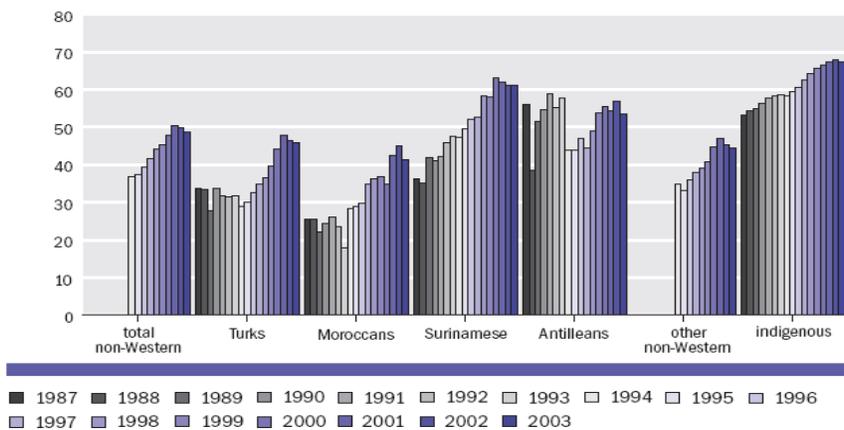
Pendekatan baru yang lebih plural mengkonseptualisasikan kembali dan menjadikan konsep tersebut lebih berorientasi kepada negara (*state centred approach*) dan lebih berorientasi pada pelakunya (*actor oriented approach*). Pendekatan baru ini berpendapat bahwa kewarganegaraan dapat dicapai melalui agen (*agency*) kewarganegaraan yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Sebagai sebuah pendekatan, hak-hak yang dimaksudkan juga dikembangkan dari hak-hak sipil dan politik, hingga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk pula hak untuk berpartisipasi secara nasional dan global (Gaventa, 2002, 5). Dengan demikian, konsep *citizenship* terkait erat dengan persoalan politik dalam masyarakat. Saat ini kekuasaan politik yang banyak memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap kebijakan kewarganegaraan. Bahkan politik ikut menentukan pendefinisian kewarganegaraan sebagai sebuah wujud nyata dari keanggotaan komunitas politik.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda bagi para imigran untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi tampaknya direspon dengan baik oleh imigran Turki. Keterlibatan dan ketertarikan sebagian besar imigran Turki dalam kegiatan kewirausahaan tidaklah semata-mata karena keterdesakan ekonomi, akan tetapi juga untuk meraih peluang untuk diterima dan diakui eksistensi mereka oleh warga lokal sebagai kelompok

13 Tulisan Gaventa tentang *citizenship* ini sudah disadur ulang oleh Yando Zakaria dari judul aslinya "Introduction Exploring Citizenship, Participation and Accountability" dalam IDS Bulletin Vo 1.33. No. 2, 2002. Dalam naskah aslinya yang disebut dengan warga adalah *citizen*. Sementara untuk kewarganegaraan ditulis dalam bentuk *citizenship*.

mayoritas (Pecoud, 2000). Pada tahun 1992 terdapat sekitar 5385 orang yang terlibat dalam kewirausahaan. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 7453 orang pada tahun 1997. Jumlah ini diprediksi terus bertambah mengingat etnik Turki adalah salah kelompok imigran yang memiliki minat yang besar pada sektor ini. Tidak hanya itu, mereka yang terlibat dalam dunia usaha sebagian besar adalah kaum perempuan. Perempuan Turki sangat jarang yang diperkenankan bekerja di luar rumah, terutama sektor formal dan terikat oleh jam kerja yang ketat, karena proporsi kerja mereka lebih banyak untuk keluarga. Oleh karena itu menjadi pedagang atau membuka usaha restoran menjadi salah satu pilihan. (Jansen, Milan, dkk, 2003).

Grafik. 2
 Imigran Usia 15-65 tahun yang bekerja berdasarkan
 Kelompok Etnik Periode tahun 1987-2003



Sumber: CBS (EBB'87-'03) dalam Gijsbert Merrove, 2004

Dalam dunia usaha, imigran Turki berada di posisi kedua setelah warga Belanda. Akan tetapi, dalam dunia pendidikan kelompok etnik Turki tidaklah lebih baik daripada orang Suriname dan Antilan. Rendahnya partisipasi orang Turki dalam dunia pendidikan salah satunya disebabkan oleh adanya larangan bagi perempuan Turki untuk sekolah lebih tinggi. Anak perempuan Turki hanya diperkenankan untuk sekolah sampai usia 18 tahun saja dan itu pada umumnya adalah lulusan sekolah menengah pertama.¹⁴ Pada tahun 1991, CBS melaporkan bahwa sekitar 97 % perempuan Turki berusia 15-24 tahun adalah lulusan menengah pertama (ISEO Report, 1991).

14 Wawancara dengan bapak Santo Koesobjono pada tanggal 31 Mei tahun 2006.

Tabel. 1

Persentase etnik minoritas yang menamatkan pendidikan berdasarkan level pendidikan yang berlaku di Belanda tahun 1998.

Highest Educational Attainment	Turkish	Moroccan	<i>Dutch</i>
Primary school at the most	34%	40%	10%
Lower vocation education (Vbo), Lower genera; secondary education (Mavo)	37%	28%	22%
Senior secondary vocational education (Mbo), Senior general secondary education (Havo), Preparatory university education (Vwo)	23%	27%	36%
Higher professional education (Hbo), university (WO)	5%	5%	32%

Source: SPVA 1998, ISEO/EUR

Note: The top row of Table 2 represents individual who finished primary school only (normal age 12), Mbo is equivalent to Havo, because both diplomas give access to higher vocation school (Hbo)

Budaya Turki masih sulit menerima kaum perempuan menghabiskan usia untuk bersekolah. Bagi penganut nilai-nilai tradisional, terutama generasi-generasi tua, hal ini berbenturan dengan nilai-nilai yang telah disosialisasikan di dalam keluarga dan itu berarti menentang keluarga. Dalam struktur masyarakat tradisional, kaum perempuan ditempatkan di area domestik atau rumah tangga¹⁵. Artinya, perempuan Turki sulit untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan di sektor formal atau sektor yang membutuhkan keterampilan di Belanda. Ini dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan antisipasi terhadap kaum perempuan agar tidak terlalu banyak bergaul dengan warga lokal, terutama kaum laki-laki Belanda (Eropa).

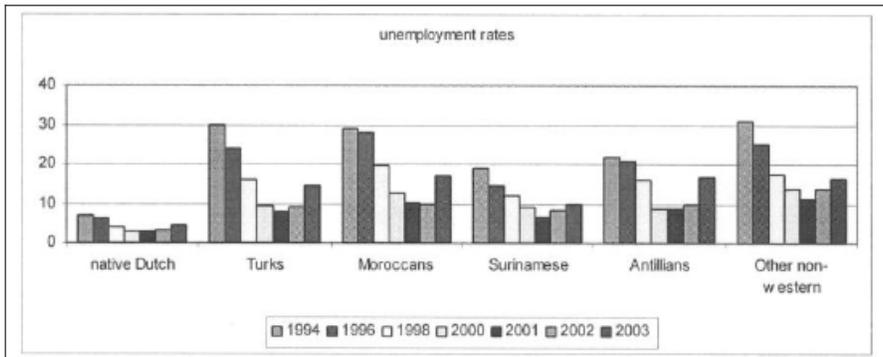
Secara perlahan, seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi, media-media massa atau pendidikan modern juga dijadikan alat yang efektif untuk menyuarakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal. Kultur Turki yang membatasi kesempatan pendidikan untuk perempuan mulai mendapat perlawanan dari kaum perempuan itu sendiri. Menurut mereka, dunia modern menuntut kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi sebagai tuntutan dari modernisasi. Sementara modernisasi itu bukanlah sebuah westernisasi. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam pemaknaannya. Modernisasi terkait erat dengan partisipasi perempuan dalam berbagai hal sedangkan westernisasi adalah menempatkan perempuan dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Barat (Belanda). Menjadi modern bukanlah harus mengikuti budaya Barat atau meninggalkan ke Turki-an (ke-Islam-an) mereka (Timmerman, 2000). Tugas dan perjuangan kaum perempuan Turki tersebut pada dekade belakangan mendapatkan dukungan dari organisasi *Diyanet Isleri Turk Islam Birliđi*

15 The Country Studies Series by Federal Research Division of the Library of Congress, 1995, "The Status of Women", dalam <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13954.html>, akses 25 Juli 2006

/DITIB.¹⁶ Dari perjuangan untuk partisipasi tersebut, perempuan Turki berharap ikut memberikan kontribusi secara ekonomi kepada keluarganya¹⁷. Pada kenyataannya secara umum etnik Turki bukanlah penyumbang utama angka pengangguran di Belanda yang posisi teratasnya dipegang oleh etnik Maroko (lihat grafik 2).

Grafik 3.

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kelompok Etnik (1994-2003)



Sumber: SOPEMI dalam Ellie Vasta, 2006

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan etnik Turki antara lain disebabkan oleh rendahnya partisipasi mereka dalam dunia pendidikan. Persoalan yang kerap kali menjadi kendala adalah mereka sulit untuk beradaptasi dengan anak-anak Belanda. Dibandingkan dengan orang Suriname, maka etnik Turki masih sulit menerima kebudayaan Eropa (Belanda) dan memilih sekolah yang sama dengan anak-anak Belanda. Meskipun demikian anak-anak Turki yang menamatkan sekolah menengah sudah mengalami peningkatan. Anak-anak Maroko dan anak-anak Turki yang tidak bersedia bergabung di sekolah umum (Belanda) akan diperlakukan diskriminatif dan sekolah mereka disebut "black school". Kecenderungan orang tua Turki memasukan anak-anaknya ke sekolah khusus adalah untuk mendapatkan pengajaran tentang budaya Turki yang dekat dengan kultur Islam. Orang tua merasa agak sedikit khawatir karena kecenderungan yang

16 *Diyanet Islari Turk Islam Birligi* (DITIB) salah satu organisasi keagamaan yang dibentuk tahun 1985 sebagai bentuk dari perlawanan terhadap Milli Görüs yang sangat konservatif.

17 Toker, Umut And Zeynep Toker, 2003, *Family Structure and Spatial Configuration in Turkish House Form in Anatolia From Late Nineteenth Century to Late Twentieth Century*, Proceedings 4th International Space Syntax Symposium London dalam <http://www.spacesyntax.net/symposia/SSS4/fullpapers/55Toker-Tokerpaper.pdf>, akses tanggal 14 Agustus 2006

terjadi pada anak-anak mereka adalah menolak mencari tahu dan mengenal tentang budaya Turki. Pada akhirnya anak-anak yang sudah memasuki sekolah menengah enggan melanjutkan sekolah, karena apa yang mereka ingin dapatkan terutama pengetahuan tentang dunia modern tidak diperoleh di sekolah. Bahkan seringkali mereka merasa bahwa sebutan “*black school*” atas sekolah yang dimasuki oleh imigran memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif (Vasta, 2006).

Tabel 2.
Tingkat Pendidikan Anak-Anak Imigran Berdasarkan Etnik

	Native Dutch		Turks		Moroccans		Surinamese		Antillians	
	1998	2002	1998	2002	1998	2002	1998	2002	1998	2002
Primary school	18	12	65	51	74	58	29	22	29	20
Lower vocational & general secondary	27	25	16	23	10	14	31	33	30	32
Intermediate vocational & general secondary	26	41	15	20	11	21	24	31	27	28
Higher education	28	23	4	6	4	8	15	14	15	20
(N)	2024	--	2880	1897	2234	1553	2404	1367	1157	906

Source: Dutch Sopemi Report 2003 (Snel, et al. 2005, 90)

Pendidikan menjadi jembatan bagi setiap orang untuk menjadi apa yang diharapkan dan membuat seseorang mampu membangun potensi yang ada dalam dirinya. Pemerintah Belanda menyadari akan pentingnya pendidikan untuk warga negaranya, terutama anak-anak imigran karena mereka memerlukannya ketika akan memasuki dunia kerja dan ketika mereka berbaur bersama masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang akan memperoleh pengetahuan, keahlian dan prinsip yang menjadi unsur dari kompetensi seseorang. Kompetensi yang dimiliki akan membantu seseorang agar sukses dalam melakukan integrasi terutama integrasi dengan lingkungan di mana pun dia berada. Oleh karena itu, imigran perlu untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di tempat yang baru. Perlakuan yang diskriminatif pun akan tereliminasi ketika salah satu imigran yang mewakili kelompok minoritas tertentu mampu menunjukkan bahwa dirinya berpendidikan dan memiliki kemampuan.

Bagi imigran Turki yang kebanyakan berkemampuan rendah, mendirikan bisnis sendiri merupakan alternatif lain dalam mencari penghidupan. Dengan menjadi wirausahawan para imigran ini memperoleh peran lain yang sedikit agak berbeda dari mereka yang menjadi kelas pekerja (Rath et al, 2002:2).

Memiliki bisnisnya sendiri bagi mereka selain berarti menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri juga menyediakan lapangan kerja untuk orang lain. Lebih jauh lagi Rath menjelaskan bahwa di tengah-tengah komunitasnya, para imigran Turki yang berkecimpung di dunia wirausaha acapkali ditunjuk menjadi pemimpin.

Membuka usaha juga merupakan salah satu jalan keluar untuk dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan bebas dengan konsumen yang merupakan warga lokal atau etnik lainnya. Batas-batas budaya dan pengetahuan tentang budaya Turki yang sejak kecil ditanamkan oleh orang tua mereka, secara perlahan mulai melebur. Identitas budaya sebagai orang Turki akan dipakai ketika seorang imigran untuk pertama kalinya terjun ke dalam dunia usaha. Bantuan saudara-saudara, termasuk di dalamnya bantuan finansial, sangat dibutuhkan. Etnik Turki memiliki *network* yang sangat kuat dalam hal ini. Akan tetapi, dalam perkembangannya, faktor etnisitas tersebut belum cukup, karena dunia wirausaha tetaplah membutuhkan kemampuan manajerial, termasuk di dalamnya kemampuan menganalisis tren dan selera pasar. Tanpa itu, seorang wirausahawan akan segera berhadapan dengan kegagalan. Komunikasi dengan etnik lain, terutama dengan orang-orang Belanda merupakan akses untuk mendapatkan informasi penting dalam mengelola usaha. Pada situasi seperti ini, identitas menjadi cair.

Identitas kultural berperan sebagai penjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat atau teman dari etnik sesama (Turki). Identitas sebagai orang Belanda, berperan untuk menjaring konsumen, relasi dan untuk mendapatkan kemudahan dalam berwirausaha. Pada periode belakangan, terutama pasca peristiwa 11 September, memburuknya pandangan warga lokal terhadap kelompok pendatang (terutama yang memiliki latar belakang Islam), membuat etnik Turki menjadi lebih liberal. Identitas sebagai orang Belanda lebih ditonjolkan daripada identitas yang lainnya. Bahkan ketika generasi pertama cenderung tertutup terhadap dunia politik, maka generasi selanjutnya mulai mencoba untuk memasukinya. Mereka yang sukses sebagai pengusaha dan yang memiliki pendidikan tinggi akan diperhitungkan untuk menjadi penentu kebijakan di Belanda. Hal yang sama juga terjadi di Jerman. Para imigran Turki memilih untuk berintegrasi dan menjadi warga negara di negara penerima mereka dengan tujuan untuk mendapatkan akses yang mudah pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, dengan berintegrasi secara politik, sosial dan ekonomi, imigran Turki akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan kesuksesan ekonomi.

Kesimpulan

Migrasi tidak hanya menciptakan masyarakat diaspora dan ras baru, tetapi ikut memberikan perubahan yang mendorong terjadinya peralihan masyarakat dalam satu wilayah yang tradisional ke arah masyarakat modern atau masuknya pengaruh asing ke dalam unsur budaya lain, yang dapat juga

disebut sebagai budaya Hibriditas (Luhulima, 1992, p.23-24). Dalam wacana pascakolonial, konsep hibriditas mengacu pada suatu penciptaan format-format transkultural baru dalam zona hubungan kolonialisasi. Konsep inilah yang banyak diasosiasikan dengan Homi Bhaba dalam tulisannya *"The Location of Culture"* (1994) yang menganalisis relasi antara penjajah dan terjajah yang saling memiliki ketergantungan di mana konstruksi budaya tidak akan mungkin dihindari, misalnya lahirnya musik Rap dan Hip-Hop, yang merupakan musik campuran Karibia-Amerika, telah menjadi bentuk musik diaspora kulit hitam.

Peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern membutuhkan kemampuan mengekspresikan pengetahuan, keahlian dan prinsip yang dimiliki. Semua akan diperoleh melalui dunia pendidikan. Keterlibatan seseorang individu sebagai warga negara dalam dunia pendidikan merupakan bentuk dari partisipasi dalam kehidupan bernegara. Pendidikan penting bagi imigran karena hal itu akan membantu mereka untuk dapat beradaptasi dalam upaya mereka untuk berintegrasi ke dalam struktur masyarakat di negara penerima. Berintegrasi bukan berarti akan kehilangan jati diri sebagai etnik pendatang. Akan tetapi, hal itu justru membantu menciptakan identitas yang baru tanpa menghilangkan identitas yang lama. Identitas bersifat cair. Ketika seseorang menunjukkan identitas formal, maka identitas nasional yang ditonjolkan. Untuk menjalin harmonisasi dan hubungan dengan komunitas etnik, maka yang dipakai adalah identitas kultural. Begitu banyak peran yang dapat dimainkan dengan identitas yang plural. Semua itu tergantung kepada kemampuan seseorang menggunakannya. ●

Referensi

- Andeweg, R.B and Galen A. Irwin. 2005. *Governance and Politics of The Netherlands*. Palgrave Macmillan.
- Barth, Frederick. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nining I. Susilo). Jakarta: UI Press.
- Crammer, John. 2002. *Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in Southeast Asia*. Malaysia: Pelanduk Publication.
- Ching Lin Pang. 2002. "Migration Policies in the Netherlands" <http://www.ces.boun.edu> akses tanggal 5 Mei 2006
- Gijsbert, Merove. 2004. *Ethnic Minorities and Integration: Outlook for the Future, Social Cultural Planning*. The Hague, Netherlands.
- Jansen, Milan, dkk. 2003. *Immigrant Entrepreneurship in the Netherlands: Demographic Determinants of Entrepreneurship of Immigrants from non-western countries*. Belanda: SCALES and SMEs Press.
- Kastoryano, Riva. 2003. "Transnational Participation and Citizenship: Immigrants in the European Union", *National Europe Centre Paper No. 64*, dipresentasikan dalam seminar The Challenges of Immigration and

- Integration in the European Union, University of Sydney.
- Luhulima, CPF. 1992. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muskens, George. 2005. *Integration Policies in the Netherlands: Data and Policy Documents*. Florence: Docu Bureaus.
- Ostergren. Robert.C. 2004. *The European: A Geography of People, Culture, and Environment*. New York: The Guilford Press.
- Ohliger, Rainer, Karen Schönwalder and Triadafilos Triadafilopoulos (ed). 2002. *European Encounters, Migrants, Migration and European Societies since 1945*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Penninx, Rinus. 2004. *Integration of Migrant: Economic, Social, Cultural and Political Dimension*. Amsterdam: European Commission.
- Pecoud, Antoine. 2000. *Weltoffenheit Schafftjobs: Turkish Entrepreneurship and Multiculturalism in Berlin*, University of Oxford (UK)
- Rhoades, Robert. E. 1978. "Foreign Labor and German Industrial Capitalism 1871-1978: The Evolution of a Migratory System", *American Ethnologist*, Vol. 5. No 3,
- Penninx, Rinus. 2004. *Integration of Migrants: Economic, Social, Cultural and Political Dimension*. European Commission Report.
- Salt, John. 2001. *Current Trends in International Migration in Europe*. Brussels: Council of the Europe.
- Schoorl, Jeannette and Liesbeth Heering, 2001. *Push and Pull Factors International Migration*. Den Haag: Lange Houtstraat.
- Rath, Jan dkk. 2002. "Working on the Fringes: Immigrant Businesses, Economic Integration and Informal Practices", <http://users.fmg.uva.nl/jrath/downloads/> akses 15 Februari 2008
- Roodenburg, Hans, Rob Euwals dan Harry Terrele. 2004. "Effect of Immigrant on Labour Market and Government Budgets: The Case of Netherlands", *European Review*, Vol 12. No 3, Academia Europea, United Kingdom.
- Siedenburg, Anton W. 2004. "The Facts, Figures and Adjustments of the Dutch Newcomer Integration Act" discussion Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany, Bogaziçi University.
- Sen, Faruk. 2004. "Turkish Diaspora in Germany: Magazine for Development and Cooperation", http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/c-478/nr-171/i.html
- Timmerman, "Who to Marry? Marriage and Migration in the Turkish Migrant Community in Flanders/Belgium", University of Antwerp 2000, <http://www.migrationonline.cz>, diakses 12 Mei 2006.
- Vermeulen, Hans and Rinus Penninx (ed). 2000. *Immigrant Integration: The Dutch Case*. Amsterdam: Het Spinhuis.
- Vasta, Ellie. 2006. "From Ethnic Minorities to Ethnic Majority Policy: Changing Identities and the Shift to Assimilationism in the Netherlands" Working

Paper No. 26 of Centre on Migration, Policy and Society , University of Oxford.

World Bank Report, tahun 2001 dan 2004.

White, B. Jenny. 1997. "Turks in the New Germany in American Anthropologist"
New Series, vol. 99. No.4 .